

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari teori ataupun konsep yang digunakan terkait dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengenai Kemitraan Balai Taman Nasional sebagai pihak pemerintah, EPASS sebagai pihak NGO, serta Kelompok Ekowisata Maleo sebagai pihak kelompok masyarakat dalam pengembangan ekowisata di kawasan taman nasional, Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango. Penulis menggunakan konsep kemitraan yang dikembangkan oleh Ambar Teguh Sulistiyani, dimana konsep kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua pihak ataupun lebih yang kemudian membentuk suatu ikatan atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan satu sama demi tujuan bersama. Menurut Sulistiyani kemitraan yang ideal yakni kemitraan yang terjalin atas dasar kesepakatan yang kemudian kedua pihak ataupun lebih saling memberikan keuntungan ataupun manfaat lebih. Kemitraan ini disebut sebagai kemitraan mutualistik atau *mutualism partnership*.

Selanjutnya pada bab ini juga akan membahas mengenai kemitraan dari prespektif kebijakan pemerintah di kawasan konservasi, sebagai salah satu wadah pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kawasan konservasi termasuk taman nasional. Selain itu juga membahas konsep ekowisata yakni sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Ekowisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, *non-government organization*, dan kelompok masyarakat melalui skema kemitraan konservasi.

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Di dalam sub bab ini akan menjelaskan studi terdahulu yang merupakan salah satu acuan penulis untuk melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya sumber serta dapat menjadi tolak ukur penulis agar mudah dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama seperti judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun penulis mengangkat beberapa sumber dimana focus penelitiannya sama, konsep yang digunakan sama serta pihak yang terlibat juga sama. Berikut beberapa sumber penelitian yang masih memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Raman, Ihyani Malik dan Hamrun tentang Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kemitraan pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep kemitraan yang mana fokus penelitian ini adalah bagaimana sinergitas antara pemerintah dengan aktor-aktor diluar pemerintah bekerjasama untuk mengatasi masalah pengrusakan hutan mangrove. Hasil penelitiannya kemitraan yang terbentuk hanyalah kemitraan semu antara pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pengelolaan hutan mangrove dimana mereka tidak memiliki suatu bentuk kesepakatan tertulis. Walaupun dalam pelaksanaannya, penanaman mangrove di Desa Tongke-Tongke terlaksana dengan baik.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Raman, Ihyani Malik dan Hamrun. 2015. *Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai*. Jurnal Otoritas Ilmu Pemerintahan. Vol. V, No. 2 Oktober 2015

Kedua penelitian Erna Kurnia tentang pola kemitraan yang terjalin antara Yayasan Obor Tani dengan masyarakat melalui pemberdayaan petani Desa Wonokerto Kabupaten Semarang. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep kemitraan. Penelitian ini untuk bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemitraan yang dilakukan guna meningkatkan pendapatan oleh yayasan obor tani dan masyarakat. Dari hasil penelitiannya menjelaskan dari sisi masyarakat, kemitraan telah memberikan dampak peningkatan penghasilan melalui budi daya buah naga, pembangunan waduk mini dan pembangunan wisma pelatihan. Sementara yayasan telah menunjukkan tanggungjawabnya kepada donator yakni PT Pertamina atas terlaksananya kegiatan sehingga menjadi nilai tambah untuk yayasan. Bagi pemerintah, program pemberdayaan memiliki manfaat yaitu membantu dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru sebagai upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan MDG's. Kemitraan yang terjalin antara Yayasan Obor Tani dan masyarakat merupakan kemitraan yang bersifat *mutualisme* dimana pihak-pihak yang terlibat mendapatkan manfaat dari kemitraan.<sup>23</sup>

Ketiga penelitian Diyahayu Purtintasari dan Utami Dewi tentang Kemitraan Pemerintah LSM dan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan teori model kemitraan mutualistik atau *mutualism partnership*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kemitraan antara pemerintah (BPBD, Dinas PUPKP, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa), LSM (PKPU *Human Initiative*, Yayasan Sheep Indonesia (YSI), dan Perkumpulan Lingkar), serta masyarakat yang tergabung dalam Forum Pengurangan Resiko

---

<sup>23</sup> Erna Kurnia.2017..*Pola Kemitraan Yayasan Obor Tani dan Masyarakat dalam Memberdayakan Petani Desa Wonokerto Kabupaten Semarang*. Universitas Diponegoro Semarang

Bencana (FPRB) Desa dan Komunitas AMC, sudah sesuai dengan *model kemitraan mutualistik* dimana aktor-aktor yang terlibat menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka. Selain itu masyarakat di Desa Argomulyo yang menjadi sasaran dari adanya kemitraan dalam mitigasi bencana juga mendapatkan manfaat yaitu dalam diri masyarakat sudah tertanam budaya dan perilaku sadar bencana.<sup>24</sup>

Keempat penelitian RA Siti Saskia Fernandya tentang Yayasan Sayap Ibu sebagai lembaga sosial masyarakat yang bermitra dengan pemerintah DKI Jakarta dalam menangani permasalahan anak terlantar atau *homeless*. Penelitian ini menggunakan konsep kemitraan dari Ambar Teguh Sulistiyani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang terjalin dari tahun 1976 ini telah memberikan hasil yakni dengan legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada LSM ini dimana LSM memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengadopsi anak yang terlantar. Kemitraan yang terjalin antara dua pihak ini merupakan kemitraan mutualistik yang saling memberikan manfaat ataupun keuntungan. Bentuk sikap kepercayaan atau *trust* yang terjalin antara pemerintah dengan LSM merupakan keuntungan yang didapatkan. Sebab keuntungan tidak selamanya diukur dengan nilai ekonomi tetapi dari sikap kedua pihak yang terlibat.<sup>25</sup>

Penelitian Rizky A. Prasajo tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Segatigede, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan konsep kemitraan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa para pihak telah memahami akan posisinya maupun peran di dalam

---

<sup>24</sup> Diyahayu Purtintasari dan Utami Dewi. 2018. *Kemitraan Pemerintah LSM dan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi di Desa Argomulyo, Kabupaten Sleman*. Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>25</sup> RA Siti Saskia Fernandya. 2019. *Pola Kemitraan antara Yayasan Sayap Ibu dan Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi anak homeless*. Universitas Diponegoro Semarang.

pembangunan Desa. Para pihak menyadari substansi kemitraan yang dilakukan. Pihak pertama yakni pemerintah Desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Sementara pihak kedua yakni masyarakat turut mempunyai andil peran secara swadaya dengan menyumbangkan pemikiran, tenaga, hingga harta benda untuk demi keberhasilan pembangunan, karena masyarakat menyadari arti pembangunan tersebut bagi mereka. Kemitraan yang terjalin antara pihak ini dapat di kategorikan kedalam kemitraan yang saling memberikan manfaat.<sup>26</sup>

Penelitian Gustian Riadi Saputra tentang Kemitraan Pengelolaan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya, studi kasus Objek Wisata Gunung Galunggung dimana objek wisata gunung galunggung ini menjadi tujuan pemerintah kabupaten Tasikmalaya menjadi wisata dunia. Karena kewenangan pengelolaan berada di bawah PT.Perhutani, maka Pemerintah dan PT.Perhutani melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan. Dalam penelitian ini menggunakan konsep kemitraan yang dilihat dari pola kemitraan yang terbentuk. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kemitraan antara Pemerintah, PT. Perhutani dengan masyarakat dalam proses pengelolaan pariwisata ini ditandai dengan adanya MoU serta Kontrak Kerja bersama masyarakat serta telah menerapkan prinsip dari kemitraan itu sendiri sehingga masing-masing pihak dapat merasakan manfaat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Rizky A. Prasojo. 2015. *Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Segatigede, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*. JKMP ISSN. 2338-445X Volume.03 Nomor.01Maret2015, hal.1-116

<sup>27</sup> Gustian Riadi Saputra.2017. *Kemitraan Pengelolaan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya, studi kasus Objek Wisata Gunung Galunggung*. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 03 Nomor 02 Februari 2019

Penelitian oleh Dwi Sudaryanto tentang pola pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pekerja Sosial Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Dimana yang kemitraan yang terjalin sebagai upaya dalam menghadapi permasalahan kemiskinan yang mengakibatkan masyarakat PMKS sulit dan terbatas untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui kemitraan yang terjalin antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan pekerja sosial masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan konsep kemitraan dari Sulistiyani. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa peran dari pekerja sosial masyarakat ialah sebagai salah satu pilar partisipan usaha keesejahteraan sosial dalam membantu pemerintah dalam mengatasi PMKS yakni dengan membantu orang yang tidak atau kurang mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Kemitraan yang terjalin yakni kemitraan yang bersifat mutualistik.<sup>28</sup>

Selanjutnya penelitian oleh Nurlisa Ginting, dkk tentang partisipasi masyarakat pada kawasan ekowisata Tangkahan. Agar dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat lokal maka dalam mengelola kawasan Tangkahan sebagai pariwisata yang menerapkan konsep ekowisata, partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam mengelola ekowisata. Tujuan penelitiannya yakni mengidentifikasi aspek partisipasi masyarakat yang ada di kawasan Tangkahan. Hasil penelitiannya menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mengelola ekowisata Tangkahan pertama dari partisipasi sumbahan ide atau pendapat di dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Kedua partisipasi dalam melaksanakan usaha-usaha untuk menudukung layanan ekowisata seperti adanya

---

<sup>28</sup> Dwi Sudaryanto.2016.*Pola Kemitraan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pekerja Sosial Masyarakat, di Kecamatan Tenayan Raya*. JOM FISIPVol,3 No.2-Oktober 2016

penyewaan *homestay*, serta penyediaan pemandu wisata. Ketiga dari partisipasi dari sisi keterampilan dengan menyediakan kerajinan lokal sebagai daya tarik wisata. Keterlibatan masyarakat lokal menjadikan mereka terberdayakan dengan adanya lapangan pekerjaan seperti penjaga penginapan, pemandu wisata, pawing gajah, dan petugas kebersihan. Selain itu masyarakat juga aktif dalam kegiatan konservasi lingkungan dengan menjaga alam dimana masyarakat lokal sering berpatroli ke dalam Taman Nasional Gunung Leuser guna mencegah terjadinya illegal logging dan perburuan liar. Namun yang masih perlu adanya evaluasi dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata yakni terutama tentang kebersihan dan kurangnya budaya lokal yang dipertujukan.<sup>29</sup>

Penelitian oleh Nur Hayati tentang Upaya Pengamanan Taman Nasional Bantimurung Bulusarung melalui Pembangunan Desa Wisata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menjaga kawasan taman nasional dari tekanan masyarakat melalui pembangunan daerah peyangga dengan pengembangan Desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengembangkan Desa wisata dengan menggunakan konsep ekowisata berbasis masyarakat, terdapat di dua Desa yakni Desa Samangki dan Kelurahan Leang-Leang dimana dua lokasi ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang mempunyai potensi objek wisata alam. Masyarakat yang berada di Kelurahan Leang-Leang telah menikmati hasil dari kunjungan wisatawan melalui kerajinan tangan berupa aksesoris yang diperjualbelikan kepada wisatawan baik domestic maupun mancanegara.

---

<sup>29</sup> Nurlisa Ginting, dkk. 2019. *Kajian Aspek Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Ekowisata Tangkahan*. Volume 2, Issue 1. e-ISSN: 2654-704X, DOI: 10.32734/ee.v2i1.412

Sementara untuk Desa Samangki potensi yang ada tidak kalah menarik dari Kelurahan Leang-Leang, selain Desa termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung juga terdapat kawasan kelelawar dan seni budaya Je'ne Taesa yang menjadi objek wisatawan. Dengan dikembangkan desa wisata sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat tekanan dan intervensi dari masyarakat terhadap kawasan diharapkan dapat berkurang. Namun yang masih menjadi permasalahannya adalah belum ada sektor swasta ataupun investor yang mau bekerja sama dengan masyarakat di dua Desa ini.<sup>30</sup>

Penelitian Said Keliwar tentang Pola Pengelolaan Ekowisata Berbasis Komunitas di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan ekowisata berbasis komunitas dan mengetahui pemberdayaan masyarakat di Kampung Cipta Gelar Taman Nasional Gunung Halimun Salak dalam pengelolaan ekowisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola pengelolaan ekowisata berbasis komunitas di Kampung Cipta Gelar memiliki atraksi wisata alam dan budaya yang beragam dan unik, seperti: panorama alam pegunungan, area persawahan, flora dan fauna langka, pola kehidupan masyarakat masih kuat memegang tradisi leluhur, seperti upacara adat seren taun, tradisi bercocok tanam, membangun rumah, bentuk arsitektur rumah, karajinan tangan (cinderamata), pembuatan gula aren semuanya menjadi produk wisata, namun pada tahap pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara maksimal. Fasilitas wisata yang tersedia sudah cukup baik. Jaringan jalan belum cukup baik dan belum tersedia. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan belum dilakukan secara intensif dan maksimal terutama dalam

---

<sup>30</sup> Nur Hayati.2013.*Upaya Pengamanan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung melalui Pembangunan Desa Wisata*. Info Teknis EBONI Volume10 Nomor02, Desember 2013 : 127 - 135



pengelolaan ekowisata yang berbasis masyarakat sehingga belum banyak memberikan manfaat ekonomi secara nyata bagi masyarakat.<sup>31</sup>

## 2.2 Kemitraan

Kemitraan sesungguhnya merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>32</sup> Kemitraan sebagai suatu konsep kerjasama memiliki beberapa kriteria, yaitu dilakukan lebih dari satu pihak, memiliki kebutuhan masing-masing, namun sepakat mencapai visi dan tujuan untuk meningkatkan kapasitas.<sup>33</sup> Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Kerjasama atau gotong royong baik yang dilakukan secara bersama, esensinya dikenal juga dengan kemitraan. Sebagaimana juga pendapat tentang kemitraan dari Notoadmojo yang menyampaikan bahwa suatu kerja sama yang dilakukan antara kelompok dengan kelompok atau organisasi-organisasi maupun individu dengan individu, demi mencapai suatu tujuan bersama yang dilakukan secara formal merupakan definisi dari kemitraan itu sendiri.<sup>34</sup>

Bentuk-bentuk/tipe kemitraan menurut Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI yaitu terdiri dari aliansi, koalisi, jejaring, konsorsium, kooperasi dan sponsorship. Bentuk-bentuk kemitraan tersebut dapat tertuang

---

<sup>31</sup> Said Keliwar.2013. *Pola Pengelolaan Ekowisata Berbasis Komunitas di Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. Jurnal Nasional Pariwisata, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2013

<sup>32</sup> Dwi Sudaryanto.2016. *Pola Kemitraan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pekerja Sosial Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*. JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016

<sup>33</sup> Ami Suswandi Putra. 2013. *Pola Kemitraan Pariwisata dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda*. Jurnal Nasional Pariwisata, Volume 5, Nomor 3, Desember 2013

<sup>34</sup> Soekidjo Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.

dalam : SK Bersama, MoU dan Pokja, Forum Komunikasi, Kontrak Kerja/perjanjian kerja.

Kemitraan dari perspektif etimologis dari akar kata *partner* yang artinya pasangan, jodoh, sekutu, kompanyon, sementara kata *partnership* diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian.<sup>35</sup> Oleh sebab itu suatu bentuk kerja sama antara dua pihak ataupun lebih yang kemudian membentuk suatu ikatan atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan di antara pihak tersebut yang oleh Ambar Teguh Sulistyani disebut sebagai konsep dari kemitraan itu sendiri.<sup>36</sup> Dengan demikian untuk saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra, maka kemitraan yang terjalin dalam suatu bidang usaha tertentu ataupun tujuan tertentu tujuannya yakni untuk peningkatan kapasitas maupun kapabilitas sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.

### **2.2.1 Model-model Kemitraan**

Di dalam kemitraan sebagaimana konsep yang dikembangkan menurut Sulistyani terdapat 3 model kemitraan berdasarkan hubungan kerja sama antar organisasi. Pertama kemitraan semu. Kemitraan ini terbentuk diantara dua pihak ataupun lebih, yang merasa sama-sama penting melakukan kemitraan namun kerja sama yang dilakukan tidak seimbang, bahkan pihak-pihak belum tentu memahami tujuan ataupun substansi yang diperjuangkan dalam kemitraan. Kedua *mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik. Model kemitraan ini merupakan model yang ideal, karena kedua pihak atau lebih yang melakukan kemitraan sama-sama memahami pentingnya melakukan kemitraan dimana kedua pihak ataupun lebih

---

<sup>35</sup> Ambar Teguh Sulistyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gaya Media. Yogyakarta. 2004. hal. 129.

<sup>36</sup> *Ibid.*

sama-sama memberikan manfaat atau mutual benefit sehingga tujuan awal melakukan kemitraan dalam berjalan optimal.

Selanjutnya yang ketiga yakni kemitraan melalui peleburan dan pengembangan. Dalam kemitraan ini para pihak seperti kelompok-kelompok maupun perorangan menyadari kelemahan dalam melakukan usaha ataupun mencapai tujuan dari organisasi mereka. Maka dengan model kemitraan ini dua pihak ataupun lebih dapat melakukan konjugasi guna meningkatkan kemampuan masing-masing. Dimana kemitraan konjugasi ini setelah para pihak mendapatkan energy kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri.<sup>37</sup>

### 2.2.2 Prinsip Kemitraan

Kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi beberapa persyaratan yakni, ada dua pihak atau lebih, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan dan saling membutuhkan. Menurut Wibisono, terdapat tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu pertama kesetaraan atau keseimbangan (*equality*), pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya, kedua transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan dan terakhir *mutual benefit* atau kemitraan yang dibentuk harus membawa keuntungan ataupun manfaat kepada pihak yang melakukan kemitraan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.130

<sup>38</sup> Yusuf Wibisono. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing, hlm.103

Terdapat sebuah keterkaitan antara sinergi, kemitraan dan pembangunan manusia. Farazmand menyatakan bahwa *“The nation and value of synergy is at the heart of partnership, be they at the local, national or global levels”* (bangsa dan nilai sinergi merupakan inti dari kemitraan, baik di tingkat lokal, nasional atau global). Kemitraan disini pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok dalam pengembangan desa penyangga melalui ekowisata di kawasan taman nasional.

### **2.3 Kemitraan di Kawasan Konservasi**

Dalam rangka mengubah paradigma pengelolaan hutan di Indonesia dengan mengedepankan masyarakat sebagai subjek pembangunan sekaligus guna menyelesaikan konflik antara pengelola dan masyarakat yang menggunakan kawasan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan salah satu kebijakan yaitu kemitraan, dimana diharapkan dapat mengakomodir kepentingan antara pemerintah dan masyarakat dengan mengedepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa 42% dari kawasan konservasi di dunia berada di Negara berkembang dimana pengelolaannya dihadapkan oleh banyak persoalan, antara lain keterbatasan dana, rendahnya pemasukan dari kegiatan pariwisata, tidak adanya manfaat ekonomi langsung maupun sikap yang tidak mendukung dari masyarakat lokal. Kemitraan konservasi sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang perhutanan sosial yang didalamnya mengatur pemberian akses kepada masyarakat sekitar, untuk kawasan

konservasi dalam bentuk kemitraan kehutanan konservasi dan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimaknai sebagai kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan.

#### **2.4 Konsep Ekowisata**

Ekowisata atau *ecotourism* merupakan konsep pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Berkembangnya baru dalam 30 tahun terakhir. Istilah *ecotourism* atau ekowisata ini baru muncul pada pertengahan tahun 1980-an. Gerakan *ecotourism* awalnya berasal dari Afrika. Awalnya para wisatawan melakukan perburuan satwa liar yang oleh mereka hal tersebut sebagai olahraga dan mereka membayar dengan harga mahal. Karena dengan membayar mahal tersebut makan kegiatan perburuan ini hanya dilakukan oleh orang kaya, sehingga kegiatan ini syarat akan symbol status sosial.

Oleh sebab itu kegiatan ini menjadi faktor terjadinya dampak negative dari pariwisata massal, dengan menurunnya populasi dari satwa liar, kualitas lingkungan yang menurun, budaya masyarakat lokal yang terdegradasi, sehingga ide untuk mengembangkan wisata yang ramah lingkungan kemudian muncul. Hal ini kemudian mendapat sambutan yang baik dari masyarakat yang ditandai dengan tingginya minat masyarakat dengan melakukan pendampingan atau sebagai

interpretasi kepada wisatawan yang melakukan kegiatan wisata ke lokasi pelestarian lingkungan.<sup>39</sup>

*The International Ecotourism Society* menjelaskan bahwa ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.<sup>40</sup> Ekowisata sebagai salah satu bentuk penerapan pariwisata yang ramah lingkungan diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk mencegah terjadinya degradasi kawasan di masa yang akan datang sebagai akibat dari aktivitas masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Ekowisata dapat memberikan pendidikan konservasi yang baik bagi masyarakat disekitar kawasan dan dapat memberikan nilai tambah baik bagi kawasan maupun bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.<sup>41</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Fandeli yang berpendapat bahwa ekowisata merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial dan tidak dapat dipisahkandari konservasi. Oleh karenanya, ekowisata disebut sebagai bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab.

Sementara itu Purwanto menyatakan bahwa daya tarik utama dari ekowisata adalah ketersediaan obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) yang bersumber dari keindahan dan keunikan obyek sumber daya alam dan sosial budaya masyarakat setempat baik flora, fauna dan lanskap serta nilai tambah dari atraksi

---

<sup>39</sup> Mark B Orams.1995. *Towards a More Desirable Form of Ecotourism*. In *Tourism Management*. Volume16, Number 1,page.3-8. Great Britain Elsevier cience Ltd. di akses melalui <http://lingkunganhidup.co/pengertian-ekowisata-dan-kriterianya/> pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 14.25

<sup>40</sup>I Wayan Thariqy Kawakibi Pristiwasa.2018. *Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Siberut di Kepulauan Mentawai*. Jurnal Pariwisata Pesona. Volume 03 No 2, Desember 2018: p 134-144

<sup>41</sup>Iwan Nugroho, Purnawan D. Negara. 2014. *Pengembangan Desa Melalui Ekowisata*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia. hal 19

budaya.<sup>42</sup> Ekowisata dihargai dan dikembangkan sebagai salah satu program usaha yang sekaligus bisa menjadi strategi konservasi dan dapat membuka alternatif ekonomi bagi masyarakat. Dengan pola ekowisata, masyarakat dapat memanfaatkan keindahan alam yang masih utuh, budaya, dan sejarah setempat tanpa merusak atau menjual isinya.

Saat ini ekowisata juga mulai di kembangkan di Indonesia salah satunya pada kawasan taman nasional. Hal ini di latar belakang oleh keadaan hutan di Indonesia menjadi sorotan tajam, karena keberdaanya yang terus merosot. Kualitas hutan yang menurun tajam utamanya pada kawasan hutan produksi. Kawasan hutan konservasi yaitu kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan utamanya taman nasional harus dijaga untuk mempertahankan dan melestarikannya. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mempertahankannya. Salah satu yang tepat dan berdayaguna yakni kebijakan mendorong dikembangkannya ekowisata di taman nasional.<sup>43</sup> Ekowisata erat kaitannya dengan prinsip konservasi. Oleh karenanya di sektor kehutanan, ekowisata diharapkan dapat menjadi kegiatan untuk memulihkan kerusakan hutan dan mengembalikan peran serta masyarakat lokal untuk ikut menjaga kelestarian hutan.

Ekowisata di taman nasional dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan zonasi pemanfaatan taman nasional sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2002 pasal 8 ayat 3. Zonasi pemanfaatan merupakan zona yang sesuai untuk dikembangkannya kegiatan ekowisata, dimana terdapat

---

<sup>42</sup> Purwanto S, Syaufina L, Gunawan A. 2014. *Kajian potensi dan daya dukung Taman Wisata Alam Bukit Kelam untuk strategi pengembangan ekowisata*. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

<sup>43</sup> C.Fandeli, M Nurdin. 2005. *Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional*. Fakultas Kehutanan UGM.

potensi fenomena alam yang menarik serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Zona ini umumnya berdekatan dengan pemukiman masyarakat, sehingga dengan dikembangkannya ekowisata di taman nasional dapat mendorong partisipasi masyarakat pada kegiatan ekowisata.

Sesuai dengan *International Union for Conservation of Nature*, serta aturan yang berlaku, taman nasional dikategorikan ke dalam *Protected Area*, dimana sebagai wilayah alamiah di daratan maupun lautan untuk melindungi ekologi demi keberlanjutan generasi, dilarang dilakukan eksploitasi yang bertentangan dengan ditetapkannya wilayah tersebut serta memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata serta rekreasi. Oleh sebab itu taman nasional dewasa ini telah dimanfaatkan keberadaannya untuk berbagai kegiatan ekonomi melalui pemanfaatan jasa wisata alam. Supriyanto dan Sari menyatakan bahwa taman nasional adalah kawasan konservasi dengan tujuan utama untuk perlindungan dan pengawetan ekosistem atau jenis serta kaya akan potensi ekonomi.<sup>44</sup> Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan taman nasional diharapkan akan mampu menjawab tantangan menguatnya ancaman krisis global berupa krisis pangan, air dan energi serta ancaman pemanasan global.<sup>45</sup>

Dengan demikian, keberadaan taman nasional baik secara konsep maupun amanat dari peraturan yang berlaku, harus mampu menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem didalamnya. Dengan mempertimbangkan fungsi ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya, yang ketiga merupakan satu

---

<sup>44</sup> Supriyanto B, Sari L. 2013. *Ekowisata Taman Nasional Di Indonesia. Di dalam: Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*; Teguh F dan Avenzora R, editor. Jakarta (ID): Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

<sup>45</sup> *Ibid.* hal 28



kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai konsep pengelolaan secara lestari. Dengan demikian pengelolaan taman nasional dengan pembangunan masyarakat yang tinggal di dalam maupun yang berbatasan dengan kawasan harus terintegrasi satu sama lain. Taman nasional di Indonesia yang telah berhasil dalam pengelolaan pariwisata berbasis alam serta melibatkan masyarakat lokal antara lain Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Gede Pangrango, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Taman Laut Raja Ampat, Taman Nasional Wakatobi

